

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, berdaya saing, maju dan sejahtera. Berbagai kegiatan pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah Jawa Timur khususnya di daerah yang masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya untuk menyamaratakan pembangunan di berbagai wilayah. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrument pembangunan.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, menurut (Chambers, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima definisi, yaitu 1. Kemiskinan (*proper*) 2. ketidakberdayaan (*powerless*), 3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*) 4. Ketergantungan (*dependence*) dan 5. Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

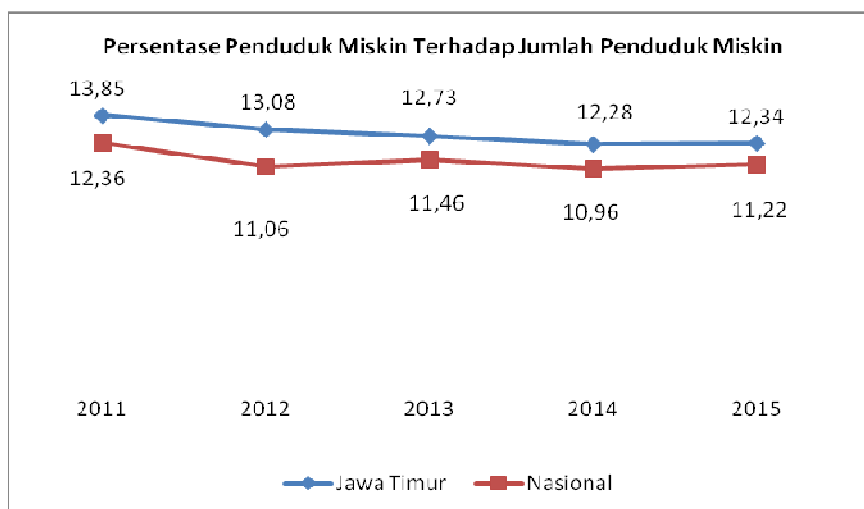
World Bank (Bank Dunia) dalam *World Bank Institue* (2005) menjelaskan bahwa menurut Bank Dunia, kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan, berdasarkan definisi tersebut kemiskinan dapat dipandang dari beberapa sisi.

Kemiskinan dipandang dari sisi moneter, dimana kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan atau konsumsi individu dengan beberapa batasan tertentu, jika mereka berada dibawah batasan tersebut, maka mereka dianggap miskin. Pandangan mengenai kemiskinan berikutnya adalah bahwa kemiskinan tidak hanya sebatas ukuran moneter, tetapi juga mencakup miskin nutrisi yang diukur dengan memeriksa apakah pertumbuhan anak-anak terhambat. Selain itu, juga bisa dari miskin pendidikan misalnya dengan menggunakan indikator angka buta huruf. Selanjutnya pandangan yang lebih luas mengenai kemiskinan adalah kemiskinan ada jika masyarakat kekurangan kemampuan dasar, sehingga pendapatan dan pendidikan yang dimiliki tidak memadai atau kesehatan yang buruk, atau ketidakamanan, atau kepercayaan diri yang rendah, atau rasa ketidakberdayaan, atau tidak hanya hak bebas berpendapat.

Menurut Todaro dan Smith (2006) kemiskinan terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antar 6 karakteristik berikut:

1. Tingkat pendapatan nasional negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
2. Pendapatan perkapita negara rendah dan pertumbuhannya sangat lambat.
3. Distribusi pendapatan sangat timpang.
4. Mayoritas penduduk di negara berkembang hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas.
6. Fasilitas pendidikan di negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif kurang memadai.

Gambar 1.1
Persentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 2011-2015 (Persen)



Sumber; BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas Tahun 2015

Dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional, tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih tergolong relatif ringgi. Persentase penduduk miskin di Jawa Timur memang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, mulai dari 13,85% pada tahun 2011 menjadi 12,34% pada tahun 2015. Akan tetapi selama periode tersebut persentase penduduk miskin Jawa Timur masih lebih tinggi dari pada persentase penduduk miskin nasional yang terus menurun dari 12,36% pada tahun 2011 menjadi 11,22% pada tahun 2014.

Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah provinsi Jawa Timur. Upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur dilaksanakan melalui tim kordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Timur melalui kebijakannya yang telah diklasifikasian oleh Permendagri no 42 tahun 2010. Dengan melalui 4 klaster kemiskinan yang pertama, kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dengan kegiatan: jaminan

kesehatan daerah, bantuan operasional sekolah, bantuan keuangan siswa miskin program keluarga harapan. Klaster kedua, kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan: jalinmatra bantuan rumah tangga sangat miskin, jalinmatra penanggulangan kerentanan kemiskinan, jalinmatra penanggulangan feminisasi kemiskinan, anti poverty program, kegiatan pemberdayaan fakir miskin dan kegiatan pemberdayaan keluarga rentan. Klaster ketiga, kelompok program berbasis pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro dengan kegiatan koperasi wanita, koperasi pondok pesantren. Klaster keempat, kelompok program murah rakyat dengan kegiatan rumah tidak layak huni dan rumah susun sederhana dengan membayar sewa. (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Timur, 2010).

Hasil dari upaya penanggulan kemiskinan di Jawa Timur memperlihatkan pengaruh yang positif. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang mengalami pola yang menurun. Keberhasilan provinsi Jawa Timur dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, yaitu angka diatas 10 persen. Tabel 1.1 menunjukkan rata-rata tingkat kemiskinan di Pulau Jawa.

Tabel 1.1
Kondisi Kemiskinan se-Pulau Jawa Tahun 2011-2015 (Persen)

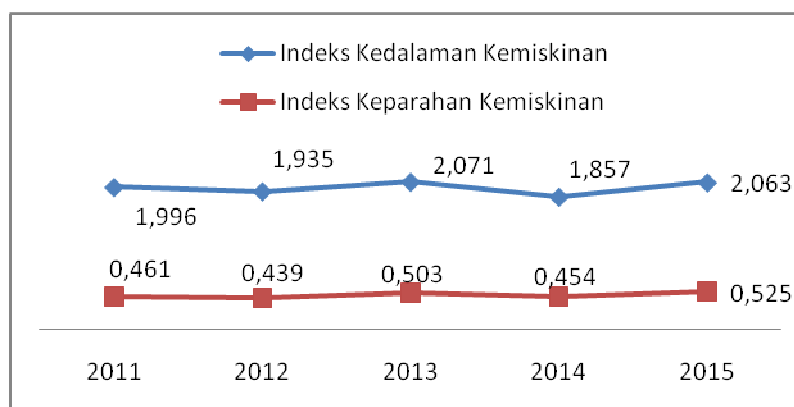
Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata
DKI Jakarta	3,75	3,7	3,72	4,09	3,93	3,83
Jawa Barat	10,65	9,89	9,61	9,18	9,53	9,77
Jawa Tengah	15,76	14,98	13,44	13,58	13,58	14,26
DI Yogyakarta	16,08	15,88	15,03	14,55	14,91	15,29
Jawa Timur	13,85	13,08	12,73	12,28	12,34	12,85
Banten	6,32	5,71	5,89	5,51	5,9	5,86

Sumber: BPS Indonesia, Susenas Tahun 2015

Rata-rata tingkat kemiskinan Jawa Timur masih dengan peringkat ketiga dibanding dengan provinsi lain di pulau Jawa, yaitu sebesar 12,75. Peringkat

pertama ditempati oleh D.I Yogyakarta dengan nilai rata-rata sebesar 15,29 dan Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat kedua dengan nilai rata-rata sebesar 14,26 dan Provinsi Jawa Barat berada di peringkat keempat dengan nilai rata-rata sebesar 9,77 dan di peringkat kelima Provinsi Banten dengan nilai rata-rata sebesar 5,86 dan di peringkat keenam D.K.I Jakarta dengan nilai rata-rata sebesar 3,38. Untuk melihat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur bisa dilihat di gambar 1.2.

Gambar 1.2
Indeks Kedalaman dan Keparahan di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2011-2015 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas Tahun 2015

Nilai indeks kedalaman kemiskinan tahun 2014 sebesar 1,857 persen menjadi 2,063 persen pada tahun 2015. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan tersebut terjadi di perkotaan serta pedesaan mengalami peningkatan. Sementara itu nilai indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan 0,071 poin atau menjadi 0,525 pada tahun 2015. Peningkatan kedua nilai menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan memberikan indikasi rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin melebar ditinjau secara daerah kota sampai desa, nilai indeks

kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan menunjukkan bahwa kesenjangan kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dari pada di perkotaan (Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2010).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat-syarat keharusan bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecakupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal (Siregar dan Wahyuniarti, 2008).

Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Syarat utama di banyak negara bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tepat adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengetaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika diringi dengan pemerataan pendapatan (Wongdesmiwati, 2009).

Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang terletak dibagian timur Pulau Jawa, dimana jumlah penduduk provinsi ini menempati urutan kedua setelah provinsi Jawa Barat. Selain itu, Ibu Kota provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya dinobatkan

sebagai kota metropoliten terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Provinsi Jawa Timur juga merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 6,55%. Selain itu wilayah Jawa Timur secara ekonomi menyumbang lebih kurang 15% dari perekonomian nasional. Besarnya kegiatan ekonomi di Jawa Timur ini disebabkan tingginya arus perdagangan barang dan jasa yang memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Timur. Tabel 1.1 merupakan data pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selama periode 2010-2014.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2010-2014

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur	Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Kontribusi JawaTimur
2010	6,68	6,14	14,71
2011	7,22	6,35	14,68
2012	7,27	6,28	14,89
2013	6,55	5,9	14,87
2014	5,86	5,02	14,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Tahun 2015

Dari tabel 1.2 dapat disimpulkan bahawa keadaan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan hal itu berbeda dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Provinsi Jawa Timur berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hampir 15 persen Provinsi Jawa Timur berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan 15 persen kontribusinya hal ini dapat dilihat menurut PDRB di berbagai Provinsi yang ada di Indonesia sebagai dalam untuk mengkontribusikan ke PDRB Nasional dapat dilihat dalam tabel 1.2

Dari peningkatan PDRB masing-masing provinsi di Pulau Jawa yang telah ditunjukkan pada Tabel 1.2 maka dapat dihitung Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Konstan 2010 Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Periode Tahun 2010-2014 pada Tabel 1.3.

Berdasarkan Tabel 1.3 rata-rata laju pertumbuhan PDRB tertinggi adalah DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur menempati urutan ke tiga, yakni sebesar 6,09%. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih belum melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus performa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan semua provinsi di Pulau Jawa. Contoh, DKI Jakarta hanya tumbuh 6,22%, Jawa Barat 5,89%, Jawa Tengah 5,29%, Provinsi Banten 5,27% dan Povinsi D.I Yogyakarta 5,23%.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Konstan 2010 Di Pulau Jawa
Tahun 2010-2014

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Rata-Rata
DKI Jakarta	6,73	6,53	6,07	5,91	5,88	6,22
Jawa Barat	6,5	6,5	6,33	5,09	5,03	5,89
Jawa Tengah	5,3	5,34	5,11	5,28	5,44	5,29
DI Yogyakarta	5,21	5,37	5,47	5,16	4,94	5,23
Jawa Timur	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44	6,09
Banten	7,03	6,83	6,67	5,47	5,37	6,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Data Olahan

Pertumbuhan ekonomi tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi yang terjadi di 29 kabupaten dan 9 kota yang ada di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi (*growth*) merupakan ukuran yang paling lazim digunakan

untuk mengetahui perkembangan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan ekonomi sangatlah penting untuk mengukur seberapa penting dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur salah satu faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan pembangunan modal manusia agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditunjang oleh masyarakat dengan modal manusia yang tinggi pula maka akan saling memberikan dampak yang positif.

Menurut Todaro (2006) teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.

Perusahaan akan memperoleh hasil lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu berkerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum

miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka memperoleh pendidikan (Sitepu dan Sinaga, 2004).

Todaro (2006) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 1.4
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional
(Persen)

Provinsi	2011	2012	2013	2014	Peringkat Nasional			
					2011	2012	2013	2014
DKI Jakarta	76,98	77,53	78,08	78,39	1	1	1	1
Jawa Barat	66,67	67,32	68,25	68,8	12	12	12	12
Jawa Tengah	66,64	67,21	68,02	68,78	14	14	13	13
DI Yogyakarta	75,93	76,15	76,44	76,81	2	2	2	2
Jawa Timur	66,06	66,74	67,55	68,14	18	18	18	18
Banten	66,22	68,92	69,47	68,89	8	8	8	8
Nasional	67,09	67,70	68,31	68,9				

Sumber: BPS Indonesia Tahun 2015

Pada tabel 1.4 bisa dilihat bahwa indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa di Provinsi Jawa Timur terlihat dari tahun ketahun mengalami peningkatan sama dengan Provinsi Jawa Tengah dan DKI Jakarta yang mengalami peningkatan disetiap tahunnya namun di Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat dan DI Yogyakarta mengalami flukiasi disetiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperbaiki di bidang pembangunan modal manusia telah terbukti ada setiap tahunnya akan tetapi pada peringkat nasional Provinsi Jawa Timur masih jauh tertinggal dengan DKI Jakarta yang menempati pertama dengan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia pada peringkat nasional se-Pulau Jawa. Jawa

Timur adalah peringkat terakhir hal ini menunjukkan bahwa masih butuh keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan modal manusia yang lebih baik lagi di setiap kebijakan yang diambil atau disetiap tahunnya. Dampak pembangunan modal manusia di Provinsi Jawa Timur berdampak pada penurunan penduduk miskin di Jawa Timur hal ini bisa dilihat di tabel 1.5.

Tabel 1.5
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Persentase Penduduk Miskin
Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Penduduk Miskin (%)
2010	6,73	15,26
2011	6,79	14,23
2012	6,85	13,40
2013	6,90	12,73
2014	7,05	12,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Tahun 2014

Pada tabel 1.5 bisa dilihat rata-rata lama sekolah mampu memberikan respon positif terhadap penduduk miskin. Meskipun berpengaruh dengan penduduk miskin rata-rata lama sekolah seluruh Jawa Timur dan di masing-masing kabupaten/kota terus meningkat dari tahun ke tahun. Data BPS (2012) pada Tabel 1.5 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah Jawa Timur mengalami peningkatan dari 6,73 tahun pada tahun 2010 menjadi 7,05 tahun pada tahun 2014. Idealnya rata-rata lama sekolah yang semakin meningkat disertai dengan tingkat kemiskinan yang juga semakin membaik. Sebagaimana uraian sebelumnya, tingkat pengangguran kemiskinan Jawa Timur selama tahun 2010-2014 cenderung menurun. Perkembangan rata-rata lama sekolah dan penurunan jumlah penduduk miskin Jawa Timur selama periode tahun 2010-2014 pada perkembangan rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Timur hanya berada di 6-7 tahun hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah yang diperoleh

masyarakat Jawa Timur hanya berada lulusan Sekolah Dasar (SD) atau belum menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dengan rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Timur dengan angka 6-7 tahun lama sekolah hal ini bisa berdampak pada upah masyarakat karena dengan rata-rata lama sekolah 6-7 tahun masyarakat tidak bisak memiliki gaji yang tinggi karena lulusan mereka hanya sampai dengan sekolah dasar. Suatu perusahaan akan berfikir panjang untuk merekrut pegawai dengan tingkat upah yang tinggi tenaga kerja yang terdidik merupakan tenaga kerja yang mampu bersaing didunia kerja dan pantas untuk mendapatkan upah yang tinggi karena mereka berinvestasi di pendidikan.

Penetapan upah di indonesia tidaklah sesuai dengan kebutuhan hidup para pekerja yang terjadi di Indonesia adalah upah besi dimana para pekerja diberikan upahs sesuai dengan kontrak kerja yang telah diputuskan bersama antara pengusaha dan pekerja. Akan tetapi upah yang diberikan ternyata secara rill nilainya sangat rendah meskipun secara nominal angkanya cukup tinggi. Penetapan upah tidak sadar membuat para pekerja berada dalam kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (primer) yang mengalami fluktuasi harga (inflasi). Dampak dari upah besi juga berdampak pada penjahatan pekerjaan oleh pengusaha. Ini dikemukakan oleh Charles Brown (1998). Charles mengatakan bahwa penentu upah besi akan berdampak pada penjahatan pekerja yang akan berdampak pada semakin banyaknya pengangguran. Penetapan upah di Jawa Timur di setiap kabupaten/kota berbeda hal ini bisa dilihat pada tabel 1.6

Tabel 1.6
Perbandingan Rata-Rata Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan Upah
Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 (Rupiah)

Upah Minimum < Upah Minimum Provinsi Jawa Timur			Upah Minimum > Upah Minimum Provinsi Jawa Timur		
No	Kabupaten/Kota	Upah	No	Kabupaten/Kota	Upah
1	Kab. Pacitan	890.000	1	Kab. Malang	1.481.003
2	Kab. Ponorogo	892.500	2	Kab. Pasuruan	1.852.500
3	Kab. Trenggalek	892.500	3	Kab. Sidoarjo	1.855.000
4	Kab. Tulungagung	958.025	4	Kab. Mojokerto	1.852.075
5	Kab. Blitar	957.500	5	Kab. Jombang	1.257.500
6	Kab. Kediri	1.088.125	6	Kab. Tuban	1.222.750
7	Kab. Lumajang	988.000	7	Kab. Gresik	1.858.950
8	Kab. Jember	1.145.250	8	Kota Malang	1.444.257
9	Kab. Banyuwangi	1.125.000	9	Kota Pasuruan	1.220.000
10	Kab. Bondowoso	969.375	10	Kota Surabaya	1.870.750
11	Kab. Situbondo	945.825	11	Kota Batu	1.403.000
12	Kab. Probolinggo	1.150.400			
13	Kab. Nganjuk	957.500			
14	Kab. Madiun	930.875			
15	Kab. Magetan	900.000			
16	Kab. Ngawi	930.500			
17	Kab. Bojonegoro	1.068.000			
18	Kab. Lamongan	1.142.500			
19	Kab. Bangkalan	1.021.150			
20	Kab. Sampang	966.600			
21	Kab. Pamekasan	1.054.950			
22	Kab. Sumenep	991.750			
23	Kota Kediri	1.122.875			
24	Kota Blitar	956.500			
25	Kota Probolinggo	1.089.250			
26	Kota Mojokerto	1.121.250			
27	Kota Madiun	967.500			
Jawa Timur = Rp. 1.172.144					

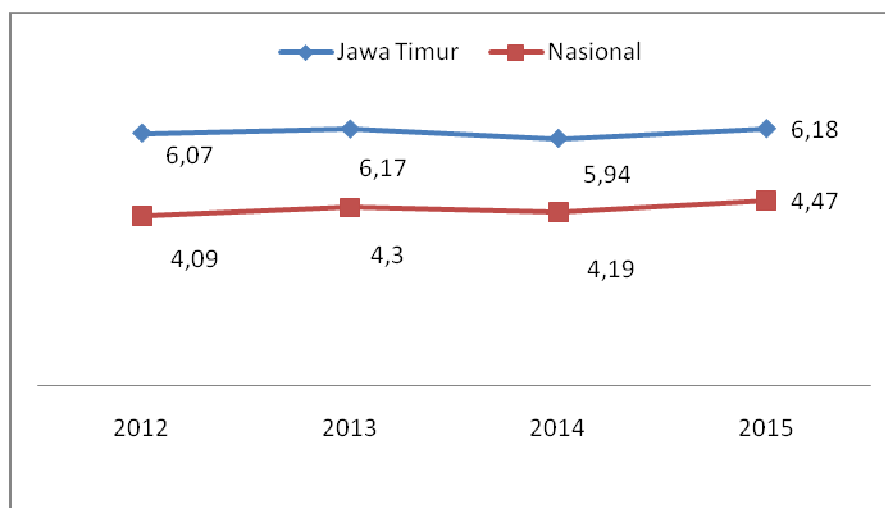
Sumber : BPS Jawa Timur, data diolah tahun 2015

Pada Tabel 1.6 bisa dilihat bahwa upah minimum yang tinggi berada di daerah perkotaan karena merupakan tumbuhnya sektor jasa dan industri sehingga upah di daerah perkotaan terbilang tinggi. Upah tertinggi berada di Kota

Surabaya dan di Kabupaten Gresik. Perkembangan upah minimum akan berdampak pada sempitnya lowongan pekerjaan dan adanya pemecatan pekerja. Berkembangnya nilai upah yang tinggi juga dapat menarik penduduk untuk bekerja di upah yang tinggi sehingga akan menambah jumlah penduduk sehingga akan semakin sempitnya lapangan pekerjaan dan menyebabkan pengangguran.

Dalam sudut pandang makro ekonomi, pengangguran yang tertinggi merupakan salah satu gambaran dampak dari tingginya tingkat pengangguran adalah banyaknya sumber daya yang terbuang percuma dan pendapatan masyarakat berkurang (Sumelson dan Nordhaus, 2010). Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tercipta sebagai akibat pertambahan lapangan kerja yang lebih rendah dari pertumbuhan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.

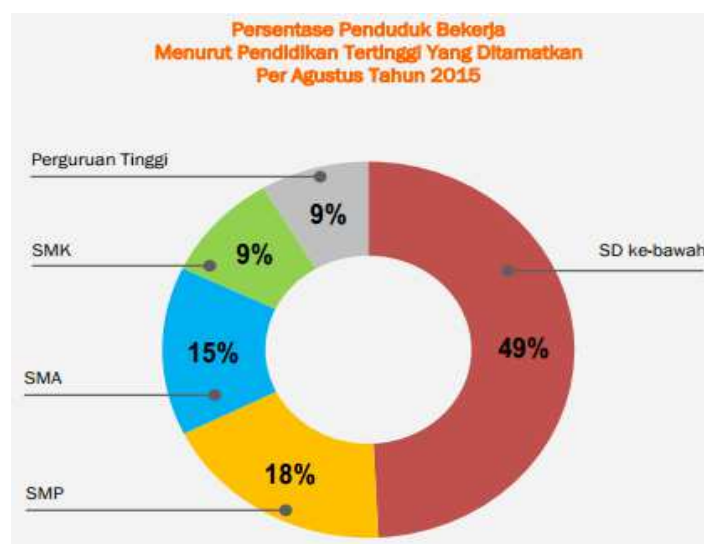
Gambar 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur dan Nasional (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 (4,47 persen) meningkat 0,28 persen dibandingkan tahun 2014. Namun lebih rendah 1,71 persen bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (6,18 persen). Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini karena masih rendahnya sumber daya manusia yang ada di Provinsi Jawa Timur bisa dilihat pada gambar 1.4

Gambar 1.4
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2015
(persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

Pada gambar tersebut bisa dilihat bahwa peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka masih banyaknya penduduk yang bekerja yang bertamatan hanya Sekolah Dasar (SD) hal ini juga berdampak pada lambatnya pembangunan modal manusia yang berkualitas. Dengan modal manusia yang rendah masyarakat akan mencari pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bertransmigrasi di upah yang cukup tinggi seperti di daerah perkotaan dan menyebabkan sempitnya lowongan pekerjaan di daerah

perkotaan maka akan bertambahnya pengangguran terbuka. Maka dari itu sektor pendidikan sangat penting untuk pembangunan modal manusia yang berkualitas diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mampu mendorong sektor-sektor lain seperti pertumbuhan ekonomi .

Menurut Singarimbun (1976), kemiskinan merupakan permasalahan yang kemungkinan tidak dapat dipandang dari satu sisi saja dikarenakan kemiskinan memiliki permasalahan yang sangat kompleks, namun dalam penelitian ini variabel yang dipilih adalah variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan, oleh karena itu hasil penelitian ini tidak dapat di generalisir secara umum.

Melalui berbagai uraian diatas menunjukan perlunya suatu penelitian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di provinsi Jawa Timur, tidak hanya faktor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga faktor-faktor lain di luar pertumbuhan ekonomi, seperti faktor upah, faktor tingkat pengangguran terbuka dan faktor pendidikan. Dalam penelitian ini ketiga variabel tersebut didekati dan dinyatakan dalam variabel upah, variabel tingkat pengangguran terbuka dan variabel pendidikan. Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2013”.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2011-2015?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2011-2015?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2011-2015?
4. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2011-2015?
5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan pendidikan secara bersama-sama mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2011-2015?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur Tahun 2011-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur 2011-2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur Tahun 2011-2015.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur Tahun 2011-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis dapat dilihat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan sesuai topik penelitian, serta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura.
2. Bagi pembaca sebagai bahan referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya, sekaligus untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis.
3. Sebagai acuan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat penganggurna terbuka dan pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.
4. Sebagai masukan pemikiran kepada pembuat kebijakan dan pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi tingkat jumlah penduduk miskin di Wilayah Provinsi Jawa Timur.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

1. Sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan kemiskinan atau mengurangi jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya seperti pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Objek penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur dengan periode kurun waktu 2011-2015. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah berupa pertanyaan kajian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian bagi kepentingan akademisi dan praktisi, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan setiap bab pada skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teori yang didapat dari penelitian terdahulu sebagai referensi, kerangka pemikiran untuk menjelaskan maksud penelitian dan hipotesis sementara atas variabel-variabel yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dengan definisi operasional, jenis dan sumber data yang digunakan, dan metode analisis data dalam penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, uraian analisis data berupa hasil pengolahan data, juga interpretasi hasil analisis objek penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan tentang hasil penelitian dan saran bagi pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.